
Antara Pariwisata dan Ekologi: Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo

Pandhu Yuanjaya*¹

¹ Department Adiministrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract. This study aims to analyzed the efforts of stakeholders in the development of ecotourism in Alas Purwo National Park which is between the ecological and tourism perspectives. This research used a case study approach. Data were collected from employees of Alas Purwo National Park Office, Tourism and Culture Office, Revenue Service and documents related to ecotourism development of Alas Purwo National Park. Data collection techniques using observation, interviews, FGD and documentation. The research findings indicated that the development of ecotourism in Alas Purwo National Park carried out by stakeholders was the result of cross-sectoral collaboration. There were three main policies, namely ecotourism management, infrastructure development and human resources. Although there were two different approaches in terms of approaches and budgeting for ecotourism development, the Banyuwangi Regency Government and the Alas Purwo National Park Office are able to synergize in creating ecotourism policies that aim to increase tourist visits but still maintain conservation values.

Keywords: Ecotourism development, national park, stakeholder

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan stakeholder pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo yang berada diantara sudut pandang ekologi dan pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari pegawai Balai Taman Nasional Alas Purwo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendapatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata Taman Nasional Alas Purwo. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, FGD dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata Taman Nasional Alas Purwo yang dilakukan oleh stakeholder merupakan hasil dari kerjasama lintas sektoral. Terdapat tiga kebijakan utama, yaitu manajemen ekowisata, pengembangan infrastruktur dan sumberdaya manusia. Walaupun terdapat dua pendekatan berbeda dari sisi pendekatan dan penganggaran pengembangan ekowisata, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Balai Taman Nasional Alas Purwo mampu bersinergi dalam menciptakan kebijakan ekowisata yang bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan namun tetap menjaga nilai nilai konservasi.

Kata Kunci: pengembangan ekowisata, taman nasional, stakeholder

Received: 08/09/2021

Revised: 16/09/2021

Accepted: 24/09/2021

Korespondensi:

Department of Public Administration, Universitas Negeri
Yogyakarta

Jl. Colombo Yogyakarta, Karang Malang, Kabupaten Sleman
Email: pandhu@uny.ac.id

PENDAHULUAN

Ekowisata belakangan ini berkembang pesat di banyak negara di dunia. Ekowisata seakan telah menjadi solusi yang menarik untuk kebutuhan lingkungan dan pembangunan pariwisata (Poudyal, Paudel, dan Tarant, 2012; Singleton, 2016). Walaupun diakui bahwa pariwisata menjadi sumber potensial bagi pemasukan devisa di banyak negara, dengan *multiplier effect* yang tinggi dari peredaran uang domestik, serta merangsang munculnya industri souvenir, hotel, restoran, travel dan peningkatan lapangan kerja (Yoeti, 2001; Mwakaje, et. al, 2013; Garrod, 2011). Pariwisata memunculkan keresahan atas eksternalitas berupa degradasi lingkungan dan sosial. Degradasi lingkungan seperti polusi udara, polusi suara, dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan (West, Igoe dan Brockington, 2006; Saenz-de-Miera dan Rosselló, 2014; dan Sheng dan Tsui, 2009) serta eksternalitas sosial seperti peningkatan biaya hidup, meningkatnya kejahatan, polarisasi sosial, dan keterasingan (Harvey, 2008; Sheng, 2016; Sheng, Li dan Wang, 2017), mendorong praktik pariwisata dapat selaras dengan ekologi seperti konsep ekowisata. Belum banyak penelitian yang melihat kebijakan ekowisata dapat berjalan optimal khususnya di Taman Nasional seiring dengan terjadinya disintegrasi stakeholder (Forjea, Tchambaa, dan Eno-Nku, 2021; Imanishimwe, Nsengimana, dan Nsengumuremyi, 2018)

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) memperkirakan pertumbuhan ekowisata rata-rata 10% setiap tahun. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan pariwisata pada umumnya, yaitu sekitar 4 persen per tahun. Popularitas ekowisata semakin meningkat seiring dengan tren minat yang tinggi terhadap wisata alam di kawasan konservasi (Prebensen, 2013). Wisatawan tertarik pada kegiatan konservasi yang menjaga keanekaragaman hayati. Apalagi, di tengah dinamika perekonomian dunia yang ditandai dengan krisis ekonomi, ketergantungan ekonomi negara maju dan berkembang, fluktuasi minyak dunia, ekowisata telah berkembang menjadi layanan pariwisata yang menjamin keberlanjutan (Damanik dan Weber, 2006; Chaminuka, 2011; Nugroho, 2011).

Pesatnya pertumbuhan ekowisata juga mendorong stakeholder untuk mengembangkan ekowisata sebagai sektor strategis di Indonesia. Indonesia berada

di peringkat kedua sebagai negara dengan megadiversitas yang sebigaian besar berada di Kawasan konservasi (World Economic Forum 2012). Di Indonesia, Kawasan konservasi di bagi dalam tiga Kawasan, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru. Penetapan kawasan konservasi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan telah mencapai 414 situs, yang terdiri dari 18,4 juta hektar daratan dan 4,7 juta hektar pantai dan lautan. Walaupun demikian, kawasan konservasi tersebut masih di bawah 10 persen dari luas daratan. Proporsi kawasan konservasi terbesar adalah taman nasional, yaitu 50 taman nasional atau 65 persen.

Dari ketiga jenis Kawasan konservasi, Taman Nasional paling banyak menjadi pilot project pengembangan ekowisata. Taman Nasional memiliki zonasi dimana sebigaian dapat dimanfaatkan sebagai destinasi ekowisata. Dengan upaya konservasi yang dimiliki, kegiatan wisata yang ada di Taman Nasional dapat sejalan dengan nilai-nilai ekologis yang ada di taman nasional (Kang and Gretzel, 2011). Praktik ekowisata di Taman Nasional di Indonesia menemui banyak hambatan sektoral. Terdapat dualisme perspektif pembangunan ekowisata yang terjadi di Indonesia. Pertama, perspektif ekologi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengelola Taman Nasional. Sedangkan kedua adalah perspektif wisata massal dari pemerintah daerah yang menginginkan potensi wisata tersebut dapat mendukung peningkatan wisatawan.

Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) yang menjadi lokus penelitian ini menghadapi masalah disintegrasi pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata. Praktik-praktik yang terjadi dalam kebijakan pengembangan ekowisata terkait pemerintah pusat dan daerah memiliki program masing-masing, sehingga terjadi tumpang tindih, disharmoni, dan munculnya ego sektoral. Kondisi tersebut yang disinyalir merupakan manifestasi dari kegagalan para pemangku kepentingan dalam mengelola potensi keanekaragaman hayati dan keindahan Taman Nasional Alas Purwo. Padahal, TNAP merupakan destinasi potensial bagi wisatawan dengan landscape hutan, tumbuhan dan satwa liar, wisata religi, dengan pantai untuk berselancar, penangkaran penyu, serta burung-burung migran.

Sementara itu, permasalahan pemangku kepentingan lainnya, seperti kurangnya akomodatif pihak Balai Taman Nasional Alas Purwo terhadap warga sekitar taman nasional, mengakibatkan terjadinya illegal logging dan perburuan satwa yang dilindungi. Kedua, kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang berada dalam wilayah otonomi Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan kerjasama secara simultan guna menciptakan *linkage tourism system*, dan masalah status pajak bagi perusahaan jasa pariwisata belum terselesaikan. Padahal, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang pengembangan kawasan ekowisata, pelaku usaha ekowisata didorong untuk berkembang agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah setempat. Dengan demikian, integrasi pemangku kepentingan akan tercipta melalui berbagai program yang diselenggarakan di berbagai level pemerintahan (Picard, 2015; Hikmawan, et. al 2020). Hal ini penting karena peran *stakeholder* menentukan keberhasilan dalam pengembangan ekowisata di kawasan konservasi (Hwang et al. 2012; Duim, Ren & Jóhannesson, 2013; Ying, 2012). Artikel ini bertujuan untuk menganalisa pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo yang berada diantara sudut pandang ekologi dan pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Yin, 2013). Pendekatan studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi kasus-kasus yang terjadi dalam pengembangan ekowisata di kawasan konservasi Taman Nasional. Taman Nasional Alas Purwo dipilih karena merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang digunakan untuk penelitian, tujuan ilmiah, untuk mendukung budidaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah satu contoh Taman Nasional Percontohan di Indonesia. Model Taman Nasional sendiri ditujukan sebagai kawasan konservasi yang idealnya dikelola sesuai dengan potensinya. Pendekatan studi kasus ini dilakukan dengan mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara, observasi, *Focus Group Discussion*, dan menelaah dokumen resmi dari para pemangku kepentingan. Informan dalam

penelitian ini berasal dari berbagai pemangku kepentingan dari Balai Taman Nasional Alas Purwo, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pengusaha pariwisata di Taman Nasional Alas Purwo, peneliti dari perguruan tinggi, masyarakat sekitar taman nasional. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo

Taman Nasional Alas Purwo merupakan kawasan pelestarian alam yang terletak di Kabupaten Banyuwangi. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer Dunia oleh UNESCO-PBB. Kawasan Alas Purwo, sebelum menjadi taman nasional, pada awalnya merupakan Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1 September 1939 dengan luas 62.000 ha. Kemudian diubah menjadi Taman Nasional Alas Purwo pada tahun 1992 dengan luas 43.420 ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 dan pada tahun 2014 ditetapkan dengan luas 44.037,30 Ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3629/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 6 Mei 2014.

Kawasan Taman Nasional Alas Purwo terletak di ujung timur Pulau Jawa dan secara administratif termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Tegaldlimo dan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Taman Nasional Alas Purwo sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Perlindungan proses ekologi sistem penyangga kehidupan.
2. Pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

3. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan berupa penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya penunjang, dan wisata alam

TNAP menggunakan sistem zonasi dengan pembagian, yaitu: 1) Zona Inti seluas 12.354,78 Ha; 2) Zona Rimba seluar 29.946,18 Ha; 3) Zona Rehabilitasi seluas 447,91 Ha; 4) Zona Tradisional seluas 481,31 Ha; 5) Zona Pemanfaatan seluas 796,07 Ha; 6) Zona Khusus seluas 1,15 Ha; dan 7) Zona Religi, Budaya dan Sejarah seluar 9,90 Ha. Ekosistem kawasan hutan TNAP yaitu pantai (hutan pantai) hingga hutan hujan dataran rendah, hutan bambu, hutan bakau, hutan tanaman dan sabana buatan. TNAP merupakan habitat bagi 700 spesies flora, 320 spesies burung, 50 spesies mamalia, 48 spesies reptil dan 15 spesies amfibi.

Data kunjungan wisatawan dari Balai Taman Nasional Alas Purwo menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan mencapai 134.130 orang, kemudian meningkat 2,46 persen pada tahun 2017 menjadi 137.430 orang. Peningkatan tajam terasa pada 2018 yang mencapai 53,5 persen menjadi 211.049 wisatawan. Balai Taman Nasional Alas Purwo menjelaskan, peningkatan wisatawan didorong oleh peningkatan akses dan penambahan fasilitas di Taman Nasional Alas Purwo, seperti infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan akomodasi. Pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo diarahkan pada kegiatan wisata pendidikan, alam dan minat khusus.

Stakeholder dan Perspektif Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo

Stakeholder dalam pengembangan ekowisata meliputi pihak-pihak yang terkait dan terdampak dari berbagai usaha pengembangan ekowisata. Identifikasi stakeholder di Taman Nasional diantaranya pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, wisatawan, penduduk lokal, akademisi dan Non-Governmental Organization (NGO) (Jamal and Stronza, 2009; Kang and Gretzel, 2011; Nugroho 2011). Secara umum, pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo dua perspektif *stakeholder* yang berbeda yaitu ekologi dan pariwisata. *Stakeholder* dengan perspektif ekologi dapat terlihat dari kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, Akademisi, dan NGO. Sedangkan stakeholder yang memiliki perspektif pariwisata yaitu pemerintah daerah, pelaku usaha, dan penduduk lokal. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa stakeholder paling berpengaruh dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo yaitu KLHK, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pelaku Usaha dan Penduduk Lokal.

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi stakeholder paling berpengaruh dalam pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo.

“Kementerian Kehutanan dalam hal mendukung pengembangan ekowisata ini mengeluarkan peraturan yang digunakan sebagai acuan kami dalam bertindak. Jadi dalam melakukan kegiatan, ada sebuah regulasi yang mengatur agar sesuai dengan yang diinginkan.” (Wawancara Koordinator Urusan Kehati BTNAP)

Pemanfaatan Taman Nasional sebagai destinasi wisata sebenarnya telah diwadahi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan NOMOR: P. 56 /Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Terdapat empat zona, yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya (untuk pemanfaatan tradisional, rehabilitasi, religi, sejarah, budaya dan minat khusus). Melalui pembagian zona ini, diharapkan tujuan konservasi dan pemanfaatan lainnya dapat dilakukan. Selain itu, dalam mendukung ekowisata KLHK juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan yang dapat menjawab keluhan akan sulitnya akses menuju destinasi wisata di Taman Nasional. Namun demikian, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KLHK mengedepankan upaya konservasi alam sebagai dasar kebijakan.

Dalam mempermudah pengelolaan TNAP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) memiliki Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) yang terletak di Kabupaten Banyuwangi. Hasil wawancara dengan Urusan Perencanaan dan Kerjasama BTNAP menunjukkan bahwa walaupun secara administratif TNAP

terdapat di Kabupaten Banyuwangi, pengelolaannya harus menggunakan perspektif KLHK. Sehingga, apabila terdapat usaha untuk membuka TNAP sebagai destinasi pariwisata massal, maka tidak akan sejalan dengan usaha-usaha konservasi yang dilakukan. BTNAP selalu terbuka terutama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyeleraskan kebijakan KLHK dengan RPJMD Kabupaten Banyuwangi.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengembangkan kebijakan ekowisata dan penunjangnya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menempatkan Alas Purwo sebagai salah satu destinasi wisata utama. Terdapat berbagai usaha dalam menarik wisatawan untuk berkunjung seperti perbaikan akses transportasi dan akomodasi, promosi wisata dan berbagai kompetisi internasional di Taman Nasional Alas Purwo.

Peran pemerintah daerah dapat berupa pembuatan perundang-undangan, membantu pendanaan, perencanaan strategi yang serasi antar lembaga, kalau pemda ya terus melakukan koordinasi yang berkesinambungan. Membuat strategi agar dapat meningkatkan potensi ini (Wawancara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan seperti pembangunan dermaga di Blok Bedul dan perbaikan akses jalan, standardisasi pelayanan hotel dan wisatawan, keamanan, dan pemungutan pajak. Selain itu juga memiliki strategi pariwisata sebagai berikut:

- a. Pengembangan pusat-pusat wisata unggulan khususnya kawasan Taman Nasional Alas Purwo
- b. Peningkatan promosi dan jejaring wisata
- c. Peningkatkan kualitas layanan dan diversifikasi produk wisata
- d. Memperkuat sumber daya pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan
- e. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan pengusaha pariwisata.

Prioritas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengembangkan pariwisata dengan destinasi utama yaitu Pantai Plengkung. Pantai Plengkung dipilih karena telah terbukti menjadi destinasi dengan

lama tinggal wisatawan tertinggi. Berikut ini Rencana Indo Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan langsung dengan TNAP:

- a. Penetapan TNAP sebagai destinasi *Top Priority Development* dengan fokus pada Pantai Plengkung, Bedul, Ngagelan dan Triangulasi.
- b. Pembangunan sarana jalan darat dan jembatan pada destinasi *Top Priority Development*.
- c. Perubahan sudut pandang pengembangan pariwisata pada wisata konservasi atau *ecotourism*.
- d. Pengembangan institusi dan kelembagaan untuk mendukung *Top Priority Development*.

3. Pelaku Usaha

Peran pelaku usaha dalam ekowisata menjadi urgen sebagai penyedia jasa wisata yang perhatian pada nilai-nilai konservasi. Terdapat tiga perusahaan di Taman Nasional Alas Purwo yang beroperasi dan memegang ijin sebagai Pengusaha Pariwisata Alam (IPPA) yaitu PT. Wanawisata Alam Hayati, PT. Plengkung Indah Wisata, PT. Wanasari Pramudita Ananta. Pelaku usaha tersebut harus memenuhi peraturan yang berlaku khusus dalam penyediaan jasa di wilayah konservasi.

Pemegang IPPA harus mengikuti peraturan tentang perusahaan kepariwisataan alam. Peraturan tersebut secara lengkap mengatur bagaimana regulasi usaha yang harus ditaati secara disiplin oleh pengusaha. (Wawancara Koordinator Urusan Perencanaan dan Kerjasama BTNAP)

Sebagai kawasan lindung, Alas Purwo ini memang ketat dalam pengaturan untuk melakukan usaha, ijinnya saja ke menteri mas. Tapi hasilnya bagus dan keberlanjutan usaha ini dapat berlangsung lama dan bermanfaat bagi banyak orang. (Wawancara Humas PT. Wanasari Pramudita Ananta)

Beberapa peraturan yang harus diikuti oleh perusahaan yang menggunakan wilayah konservasi di TNAP diantaranya hak guna tanah sebesar maksimal 5 hektare namun perusahaan hanya dapat memanfaatkan 10% sebagai lokasi usaha. Selain itu,

bangunan hotel atau penginapan untuk akomodasi wisatawan diwajibkan semi permanen, serta kebutuhan material harus berasal dari luar kawasan konservasi.

Meskipun demikian, ternyata kondisi tersebut justru menjadi daya tarik wisata karena memiliki konsep yang jauh berbeda dengan konsep wisata massal. Pelaku usaha menekankan yang tidak boleh terlupa pada wisata modern saat ini, akses internet bagi pengunjung dan promosi harus terpenuhi. Selain itu, semua pelaku usaha memiliki kantor promosi di Kuta, Bali dengan akses cepat menggunakan speedboat ke TNAP khususnya pantai plengkung. Kegiatan menarik dan menantang juga diselenggarakan oleh hotel apabila kondisi ombak tidak memungkinkan untuk olah raga selancar, maka pihak hotel memanfaatkan alat transportasi tradisional yaitu *grandong* (alat transportasi bermesin sederhana) untuk berkeliling di Taman Nasional Alas Purwo seperti Sadengan, Triangulasi, dan Ngagelan.

4. Penduduk Lokal

Peran penduduk lokal dalam Ekowisata di Alas Purwo pengelolaan ekowisata dan menjaga zona terluar Taman Nasional Alas Purwo

Pengaruh Taman Nasional Alas Purwo ini sangat besar terutama pada masyarakat sekitar. Seperti penyuluhan, lapangan kerja, pengetahuan mengenai lingkungan dan banyak sekali. (Wawancara Koordinator Urusan Perencanaan dan Kerjasama BTNAP)

Orang-orang di sini banyak yang ikut jadi sopir, pekerja hotel, nelayan juga ganti kerjaan nyewakan perahunya buat keliling sini, dan sekarang sudah mulai sedikit yang berani nebang kayu sama cari celeng (babi hutan). (Wawancara Pengemudi Perahu Wisata)

Keterlibatan penduduk lokal dalam ekowisata di TNAP yaitu akan jasa parkir, jasa penyewaan perahu, dan pedagang makanan. Masyarakat juga membuat Badan Pengelola Ekowisata (BPE) berbasis masyarakat. Badan tersebut melakukan pemberdayaan masyarakat disekitar TNAP dengan berbagai kegiatan ekowisata. Selain itu, BTNAP juga melibatkan penduduk lokal sebagai kader konservasi, pembinaan habitat untuk *feeding ground*, serta membina masyarakat sebagai pengelola hutan mangrove.

Sinergi Kebijakan Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo

Sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat berkelanjutan antar program ekowisata di semua institusi. Berbagai dimensi ekowisata harus dirumuskan untuk tata kelola yang dapat memprioritaskan tujuan pengelolaan dan pemasaran, integrasi saluran distribusi, keberhasilan kebijakan, dan keberlanjutan rantai nilai pariwisata pemerintah (Bramwell dan Lane, 2009; Song et al. 2013).

Dari beberapa pemangku kepentingan seperti yang dipaparkan sebelumnya, terdapat empat pemangku kepentingan yang memiliki peran langsung dalam pengembangan ekowisata di TNAP, yaitu Balai Taman Nasional Alas Purwo, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pelaku Usaha dan Penduduk Lokal. Stakeholder paling berpengaruh tersebut harus memiliki sudut pandang yang sama karena banyak program ekowisata di negara berkembang bertumpu pada pemerintah yang sering mengalami kurangnya kapasitas dalam perencanaan dan promosi wisata (Bhuiyan, 2011).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak diantara program-program ekowisata tersebut menuntut kemauan politik untuk merubah visi dari pariwisata masal ke ekowisata, untuk membantu Balai Taman Nasional Alas Purwo mengenai segala aspek pengembangan ekowisata. Ekowisata memerlukan investasi yang sangat besar, sehingga stakeholder harus punya komitmen yang tinggi. Untuk meningkatkan kerjasama tersebut, telah dibentuk Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) yang harus dihadiri oleh seluruh instansi pemerintah daerah, instansi sektoral dan instansi terkait lainnya dimana forum tersebut bertujuan untuk menyelaraskan rencana pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo.

Pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo apabila mengacu pada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan ekowisata oleh Nugroho (2011) yaitu manajemen ekowisata, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen Ekowisata

Manajemen ekowisata merupakan upaya menyinergikan berbagai sektor penunjang ekowisata. Program pengembangan ekowisata Taman Nasional Alas Purwo dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tujuan wisata. BTNAP maupun Kabupaten Banyuwangi selalu menekankan bahwa Taman Nasional Alas Purwo merupakan Kawasan konservasi dengan wisata minat khusus. Sehingga pengunjung dapat mengantisipasi kunjungan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh BTNAP terutama yang berkaitan dengan konservasi flora dan fauna.
- b. Produk wisata. Pengembangan ekowisata Taman Nasional Alas Purwo yang sesuai perundang-undangan dan estetika arsitektur dalam pembuatan bangunan fasilitas wisata, juga atraksi alam seperti ombak dan kemasam perilaku hewan liar sangat menarik pengunjung untuk datang.
- c. Promosi. Media massa rutin meliput TNAP sebagai acara televisi. Taman Nasional Alas Purwo telah terhubung dengan jaringan global khususnya website ekowisata. Selain website Taman Nasional Alas Purwo (tnalaspurwo.org), juga dapat diakses banyuwangitourism.com, g-land.me, g-land.info, g-land.asia, mengenai agenda kegiatan, paket wisata, penelitian, akses, *tour*, biaya dan sebagainya. Liputan di televisi dan film dokumenter mengenai wisata di Taman Nasional Alas Purwo.
- d. Pengendalian rombongan. Kegiatan pengunjung mencakup tiga aspek, yaitu pengaturan perijinan, seleksi dan klasifikasi pengunjung, dan pengaturan jumlah pengunjung. Pengaturan perijinan harus disertai dengan kegiatan penyuluhan di pusat informasi dan pintu masuk kawasan. Kegiatan ini dilengkapi dengan penerapan sistem seleksi dan mengatur jumlah pengunjung sesuai dengan daya dukung kawasan. Dipintu masuk disediakan angket sebagai pengujian awal pengunjung dalam menjelajah alam, pengetahuan tentang konservasi dan apresiasi pengunjung terhadap pentingnya konservasi. Pada puncak periode padat kunjungan dilaksanakan distribusi jumlah pengunjung secara merata disemua jalur jelajah yang tersedia menurut tingkat kemahirannya.

- e. Sikap dan partisipasi penduduk lokal. BTNAP membuat kegiatan Pengembangan Bina Cinta Alam yaitu terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari kegiatan pendidikan lingkungan pada sekolah-sekolah desa penyangga, kegiatan pembinaan kader konservasi bagi masyarakat, kegiatan bina pramuka lingkup kwartir cabang banyuwangi, kegiatan bina cinta alam dengan lomba penyusunan karya tulis ilmiah dan artikel dengan tema “TNAP *Conservation Camp* “ dan kemudian dilanjutkan dengan seminar. Partisipasi penduduk juga dapat dilihat dari penyertaan sebagai pegawai hotel, pemanfaatan mobil penduduk sebagai transportasi, nelayan di ajak untuk menjalankan perahu wisata, pengadaan warung dan sebagainya.

2. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dan fisik dilakukan dengan program dan anggaran berbagai pihak. Selain KLHK, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pelaku usaha, pada proyek yang membutuhkan pendanaan lebih besar program diarahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Namun demikian, KLHK tetap menjadi pihak yang mengontrol pembangunan agar baik dari sisi desain dan operasional tidak mengganggu ekosistem di TNAP. Pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan arsitektur, budaya, dan pengetahuan lokal. Lebih lanjut, program-program pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo dapat dijelaskan empat hal yang pokok dalam pembangunan infrastruktur ekowisata menurut Eagles et al. (2009), yaitu:

a. Perencanaan Infrastruktur

Kesiapan infrastruktur ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo secara berkesinambungan juga selaras dengan kaidah konservasi ditulis dalam rencana program 25 tahun, lima tahunan dan juga tahunan. Dari rencana tersebut dapat dilihat mengenai perencanaan infrastruktur dan realisasinya yang di laporkan tiap tahun. Seluruh aspek menurut kaidah dan perundangan-undangan yang berlaku diperhatikan untuk kemudian dijadikan maasterplan. Seperti pembangunan sarana dan prasarana wisata, tingkat keamanan, dampak lingkungan, pengembalian habitan

akibat wisata, biaya, kerjasama antar *stakeholder*, penggunaan bahan bangunan dan lain sebagainya.

b. Faktor budaya

Budaya masyarakat sekitar TNAP dekat dengan budaya “Blambangan”. Hal ini membuat Taman Nasional Alas Purwo tidak bisa dilepaskan dari budaya yang berkembang. Selain arsitektur khas hindu dan pura juga arsitektur tradisional jawa-bali juga ditampilkan oleh desain hotel. Masyarakat sekitar sangat aktif dilibatkan dalam desain lanskap untuk bangunan. Selain itu model burung merak juga mendominasi patung, hiasan dan lukisan di Taman Nasional Alas Purwo.

c. Faktor Lingkungan

Standar mutu wisata berbasis lingkungan sudah diterapkan cukup baik, seperti durasi pengaturan penggunaan listrik, pelaksanaan pembangunan dan renovasi bangunan, menjaga kealamian untuk sarana dan prasarana, penempatan *shelter* yang strategis dan lain sebagainya. Standar lingkungan yang menjadi acuan sedikit tidak dipatuhi apabila melihat pendingin ruangan (AC) masih digunakan di hotel dengan kelas *Superior/mewah*.

d. Transportasi

Sarana transportasi jalan, jalur perjalanan, udara, *boat* menuju wilayah wisata mungkin memberikan pengalaman dan nilai lebih bagi pengunjung, namun juga dapat mengganggu flora-fauna atau membahayakan pengunjung sendiri apabila tidak dikelola secara hati-hati. Salah satu isu paling menonjol dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional adalah pengaspalan jalan yang melintas ditengah Taman Nasional 12,6 km. Sejak awal ide ini muncul, banyak pemerhati lingkungan dan NGO internasional ramai memprotes. Alasannya jelas, pengaspalan jalan akan mengganggu mobilitas satwa lindung akibat dari proses pembangunan dan masifnya kunjungan. Namun, setelah 5 tahun direncanakan, pengaspalan tetap dilakukan pada tahun 2019 karena akses jalan menjadi urgen untuk dilakukan sebagai upaya mendukung wisata konservasi dan mobilitas peneliti di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Namun, pada zona inti, Taman Nasional Alas Purwo mempertahankan jalan

macam yang cukup baik dan mudah dilalui pengunjung yang melewati jalur darat baik dengan roda empat, roda dua atau truk. Di pantai plengkung sudah dilengkapi dengan *helipad* bagi pengunjung yang mengendari helikopter, dan terdapat dermaga tradisional untuk pemberhentian *speed boat* dan perahu. Pemilihan infrastruktur jalan ini diharapkan mengurangi efek negatif yang mungkin timbul seperti jalan aspal akan menimbulkan polusi dan mendorong kendaraan untuk bergerak cepat yang membahayakan satwa liar.

3. Sumber Daya Manusia

Stakeholder ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo melaksanakan pengembangan pegawai melalui diklat, pelatihan, kursus, beasiswa pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ekowisata. Program-program pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan Banyuwangi, Balai Taman Nasional maupun *stakeholder* lainnya telah menunjukkan hasil yang positif dengan meningkatnya kunjungan wisatawan di Taman Nasional Alas Purwo.

Berbagai upaya pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah dan masyarakat lokal. Peran sektor ekowisata terhadap aspek ekonomi dapat dilihat dari ukuran pendapatan, pajak dan retribusi, PDRB maupun output total (Nugroho, 2011). Peningkatan jumlah pengunjung di Taman Nasional Alas Purwo terus meningkat di tiap tahunnya seiring dengan pengembangan ekowisata yang telah dilakukan. Namun tingkat hunian hotel yang ada di Taman Nasional Alas Purwo tidak mengalami perubahan secara signifikan. Padahal semakin banyak pengunjung yang menginap di hotel dalam Taman Nasional Alas Purwo akan turut serta menambah pemasukan ke daerah berupa pajak hotel. Hal ini terlihat dari kontribusi pajak hotel di Taman Nasional Alas Purwo terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 adalah sebesar 0,13%, tahun 2018 adalah sebesar 0,11%, tahun 2019 adalah sebesar 0,11%, tahun 2020 adalah sebesar 0,13%. Berdasarkan persentase tersebut, maka dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi yang diberikan oleh pajak

hotel di Taman Nasional Alas Purwo yang belum tergali secara optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran pajaknya memang kecil, namun sebenarnya kalau mau dicermati banyak faktor yang jadi sebabnya, seperti wajib pajak sedikit bandel, kita pengalaman sebenarnya mengatasi hal ini, namun khusus ini kita hingga rapat ke tingkat Kementrian. Pada tahun 2009, pemilik hotel tidak mau membayar, padahal tahun-tahun sebelumnya membayar, menurut mereka, mereka sudah dibebankan membayar iuran ke Alas Purwo dan tidak perlu ke Pemda. Jadi Bupati langsung mengirim surat permintaan kejelasan ke menteri, setelah di mediasi dari seluruh pihak yang terlibat, diputuskan bahwa pajak tetap harus di bayar ke daerah berupa pajak hotel. Selain itu bedul bisa di kenakan pajak hiburan di tahun mendatang. (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)

Berdasarkan wawancara diatas, terlihat bahwa besarnya kunjungan ke Taman Nasional Alas Purwo belum mampu dimanfaatkan. Banyak dari pengunjung lebih memilih menginap jauh dari Taman Nasional Alas Purwo karena kurang dapat menjangkau harga hotel di Taman Nasional Alas Purwo.

Kurangnya koordinasi terlihat dari konflik yang terjadi berupa masalah pembayaran pajak daerah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hingga pada akhirnya mediasi difasilitasi oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemdagri dengan instansi yang terkait yaitu Ditjen Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam Kemenhut, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Balai Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan hasil bahwa pungutan pajak hotel sudah sesuai dengan perundang-undangan dibidang perpajakan dan tidak duplikasi dengan pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Usaha Pariwisata Alam (IUPA), Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) dan karcis masuk kawasan. Selain sebagai pajak daerah, pemasukan daerah dari Taman Nasional Alas Purwo secara tidak langsung didapat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Seperti karcis masuk dan lainnya nanti di setor secara vertikal, yaitu Balai ke Kemenhut yang masuk ke APBN berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Nantinya PNBP ini juga akan di bagikan ke daerah yang dinamakan dana perimbangan dan bagi hasil. Besaranya berbeda karena dibagikan ke daerah yang

ditempati, provinsi, dan pemerataan. (Kepala Bagian Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)

Taman Nasional Alas Purwo yang merupakan pengelola wilayah dalam periode tertentu diharuskan memberikan hasil secara vertikal kepada Kementerian Kehutanan yang selanjutnya masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan distribusikan dengan mengacu pada UU No. 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pusat dan Daerah. Dalam APBD Kabupaten Banyuwangi masuk dalam dana perimbangan dan dana bagi hasil. Distribusi penerima dana perimbangan dan bagi hasil dari Taman Nasional Alas Purwo dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1

Distribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Taman Nasional

Lembaga Penerima	Jumlah (%)
Pemerintah Pusat	20%
Pemerintah Provinsi	16%
Daerah Penghasil (Kabupaten Banyuwangi)	32%
Pemerataan pada Seluruh Daerah di Prov. Jatim	32%

Sumber: UU RI No. 33 Tahun 2004

Kontribusi yang cukup besar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada nilai karcis/tiket masuk Taman Nasional Alas Purwo dari harga per karcis Rp. 5.000,- dengan jumlah wisatawan 2016 sebesar 134.130 orang, pada 2017 meningkat 2,46 persen menjadi 137.430 orang sedangkan pada 2018 meningkat sebesar 53 persen menjadi 211.049, dan meningkat sebesar 62 persen menjadi 341.899 orang. Peningkatan ini didorong oleh akses didalam taman nasional yang lebih baik setelah pengaspalan jalan. Selain itu penekanan terhadap hasil yang di dapat dari pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo yaitu *multiplier effect* baik secara makro yaitu dapat dilihat dari peningkatan PDRB dan PAD, maupun secara mikro yaitu peningkatan kunjungan hotel, restoran dan toko khas makanan Banyuwangi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo merupakan hasil dari kerjasama lintas sektoral yang didasarkan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang searah, sejalan dan berkesinambungan. Terdapat perbedaan sudut pandang pengembangan ekowisata, yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ingin menjadikan Taman Nasional Alas Purwo salah satu atraksi wisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sedangkan Balai Taman Nasional Alas Purwo yang menjaga fungsi taman nasional sebagai kawasan konservasi. Melalui berbagai usaha mensinergikan kebijakan dari seluruh stakeholder, pengembangan ekowisata didasarkan pada tiga fokus kebijakan yaitu manajemen ekowisata, pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga kebijakan tersebut mampu menciptakan ekowisata dengan kunjungan wisatawan yang meningkat setiap tahun namun tetap menjaga nilai-nilai konservasi. Kedepan, perlu adanya forum koordinasi yang lebih kuat antara stakeholder dalam mensinergikan perencanaan jangka panjang ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhuiyan, A. H, et al. 2011. *The Role of Government for Ecotourism Development: Focusing on East Coast Economic Region*. Journal of Social Sciences 7 (4): 557-564, 2011. ISSN 1549-3652. 2011 Science Publications
- Bramwell, B., & Lane, B. 2009. *Sustainable tourism and the evolving roles in government planning*. Journal of Sustainable Tourism, 18(1), 1–5.
- Chaminuka, P. et al. 2011. *Tourist preferences for ecotourism in rural communities adjacent to Kruger National Park: A choice experiment approach*. Tourism Management 33 (2012) 168e1760261-5177/2011 Elsevier Ltd. All rights reserved. doi:10.1016/j.tourman.
- Damanik, J dan Weber, F.H. *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi

- Duim, R, Ren, C and Jóhannesson, G. 2013. *Ordering, materiality, and multiplicity: Enacting Actor–Network Theory in tourism*. *Tourist Studies*. 13(1) 3–20. DOI: 10.1177/1468797613476397. tou.sagepub.com
- Eagles, et al. 2009. *Good governance in protected areas: an evaluation of stakeholders' perceptions in British Columbia and Ontario Provincial Parks*. *Journal Of Sustainable Tourism*, DOI:10.1080/09669582.2012.671331
- Forjea, G. W., Tchambaa, M. N., Eno-Nku, M. 2021. Determinants of ecotourism development in and around protected areas: The case of Campo Ma'an National Park in Cameroon. *Scientific African*. Volume 11
- Garrod, Brian. 2011. *Local Participation in the Planning and Management of Ecotourism: A Revised Model Approach*. Faculty of Economics and Social Science, University of the West of England. Brian.Garrod@uwe.ac.uk.
- Hikmawan, M. D., Hamid, A., Nurrohman, B., Ramadhan, G., Mayruddin, M. Y. 2020. Collaborative Governance Model on Agricultural Business in Banten, Indonesia. *Jurnal Transformatif*, Vol. 6 No. 2. DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.3
- Hwang, D et al. 2012. *Community Behavior and Sustainable Rural Tourism Development*. *Journal of Travel Research*. 51(3) 328–341. DOI: 10.1177/0047287511410350. <http://jtr.sagepub.com>
- Imanishimwe, A., Nsengimana, V., Nsengumuremyi, C. 2018. Contribution of ecotourism to the conservation of Nyungwe National Park in Rwanda. *J. Tour. Hosp.*, 7 (2)
- Jamal, T and Stronza, A. 2009. 'Dwelling' with ecotourism in the Peruvian Amazon: *Cultural relationships in local–global spaces*. *Tourist Studies*. vol 8(3) 313-335. DOI: 10.1177/1468797608100593. www.sagepublications.com
- Kang, M and Gretzel, U. 2011. *Effects of podcast tours on tourist experiences in a national park*. *Tourism Management* 33 (2012). 440e4550261-5177/by Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.tourman.
- Mwakaje, A. G et al. 2013. *Community-Based Conservation, Income Governance, and Poverty Alleviation in Tanzania: The Case of Serengeti Ecosystem*. *Journal of*

- Environment & Development 22(1) 51–73. DOI: 10.1177/1070496512471949.
jed.sagepub.com
- Nugroho, Iwan. 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Picard, David. 2015. Making ecotourism sustainable: refocusing on economic viability. Lessons learnt from the “Regional strategic action plan for coastal ecotourism development in the South Western Indian Ocean”, *Journal of Sustainable Tourism*, 23:6, 819-837
- Poudyal N. C, Paudel, B & Tarrant, M. A. 2012. *A time series analysis of the impact of recession on national park visitation in the United States*. *Tourism Management* 35 (2013) 181e189. 0261-5177/Elsevier Ltd. All rights reserved. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman>.
- Prebensen N. K and Lee, S. Y. 2013. *Why visit an eco-friendly destination? Perspectives of four European nationalities*. *Journal of Vacation Marketing*. 19(2) 105–116. DOI: 10.1177/1356766712457671. jvm.sagepub.com
- Saenz-de-Miera, O., & Rosselló, J. (2014). Modeling tourism impacts on air pollution: The Case of PM10 in Mallorca. *Tourism Management*, 40, 273–281.
- Schwartz, Z. et al. 2011. *Visitation at capacity-constrained tourism destinations: Exploring revenue management at a national park*. *Tourism Management* 33 (2012) 168e176. Elsevier Ltd. All rights reserved. doi:10.1016/j.tourman.
- Sheng, L., & Tsui, Y. M. (2009b). A general equilibrium approach to tourism and welfare: The case of Macao. *Habitat International*, 33(4), 419–424.
- Sheng, L., Li, T., & Wang, J. (2017). Tourism and externalities in an urban context: Theoretical model and empirical evidence. *Cities*, 70, 40–45.
- Singleton., Benedict E. 2016. Framing a Supermantra: Ecotourism, Engagement and Conceptualisations of ‘Good’ Development, *Forum for Development Studies*, 43:3, 463-487,
- Song, H. 2013. *Tourism Value Chain Governance: Review and Prospects*. *Journal of Travel Research*. 52(1) 15–28. DOI: 10.1177/0047287512457264. <http://jtr.sagepub.com>

- West, P., Igoe, J., and Brockington, D. 2006. *Parks and peoples: The social impact of protected areas*. *Annual Review of Anthropology*, 35, 251–277.
- Yin, K Robert. 2013. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ying, T and Xiao, H. 2012. *Knowledge Linkage: A Social Network Analysis Of Tourism Dissertation Subjects*. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, Vol. 36, No. 4, November 2012, 450-477. DOI: 10.1177/1096348011400745. jht.sagepub.com
- Yoeti. Oka A.2001. *Ilmu Pariwisata: Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*. Jakarta: PT. Pertja